

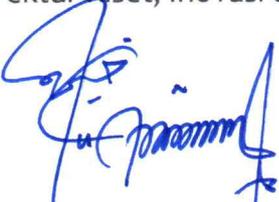
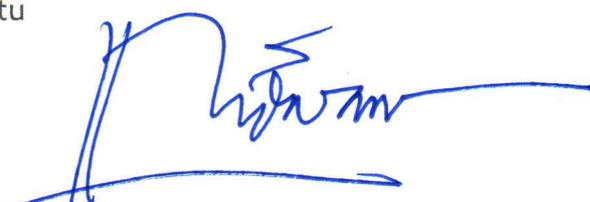
**RENCANA INDUK PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (RIPPM)
PERIODE 2021 - 2025**



**DIREKTORAT RISET, INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG 2021**



**RENCANA INDUK PENGABDIAN
DIREKTORAT RISET, INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
PERIODE 2021 – 2025**

Kode Dokumen	: 041003-DRPM-042025
Edisi Revisi	: 02
Tanggal Pengesahan	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Sekretaris DRIPM,  Hamdan Hidayat, S.Pd., M.MPd. NIDN. 0412018502
Dikendalikan oleh	: Direktur Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat  Dr. Ahmad Khori, M.MPd., M.Pd.I. NIDN. 0428118401
Disetujui oleh	: Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Penjaminan Mutu  Ahmad Muhammad Ridwan Saiful Hikmat, S.Si., MH NIDN. 0424126804
Disahkan oleh	: Rektor,  Dr. H. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H. NIDN. 401066705

DESKRIPSI UMUM

Sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat terus berupa meningkatkan hasil pengabdian yang memiliki nilai ekonomis di perguruan tinggi, sehingga harus memiliki kedekatan dengan dunia industri, pemerintahan serta mempunyai kontribusi yang nyata untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Untuk itu Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Nusantara menyusun dokumen Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat (RIPPM) yang dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi dan misi Uninus selama 5 tahun ke depan.

RIPPM ini sebagai acuan bagi dosen di lingkungan Uninus yang akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi Uninus. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Uninus akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya.

Menyadari pentingnya pengabdian pada masyarakat bagi pengembangan kualitas SDM Perguruan Tinggi maka Uninus dalam rencana strategik tahun 2016 - 2035 salah satu tujuannya adalah menyelenggarakan program riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang lebih terarah dan lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan kontribusi Uninus dalam proses pelaksanaan pembangunan. Rencana strategik tersebut mengarah pada Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat. Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Uninus ini mengacu atau disusun berdasarkan arahan Renstra dan Renop Uninus 2016 – 2035 dengan pendekatan *Different and Distinctive* yang dimaksudkan sebagai upaya menjawab tantangan DRIPM dan Uninus sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat saat ini dan mendatang, sekaligus mengikuti dan memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program penyusunan Rencana Induk pengabdian pada msyarakat (RIPPM) diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfir akademik yang kondusif. Produk pengabdian ini ke depan menjadi acuan pengembangan kampus. Memperhatikan betapa pentingnya pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan Perguruan Tinggi seperti diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan pengabdian pada masyarakat yang berkesinambungan dan tepat maka diperlukan Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) Uninus sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat unggulan di lingkup Uninus.

RIPPM dapat memberikan arah terhadap pengabdian pada masyarakat, yang melibatkan antar disiplin ilmu serta mensinergikan dengan seluruh program studi yang ada di lingkungan Uninus yang dapat mempercepat peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Renop Uninus.

Bandung, Maret 2021

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Riset, Inovasi dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu tugas pokok sivitas akademika perguruan tinggi yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dengan demikian DRIPM Uninus, sebagai fasilitator, harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi unggulan serta dijadikan acuan oleh sivitas akademika Uninus. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*Roadmap*), melaksanakan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/ menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh institusi.

DRIPM Uninus senantiasa berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif agar sivitas akademika secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan terencana. DRIPM Uninus selanjutnya memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian, inovasi dan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian, inovasi serta pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. DRIPM Uninus senantiasa mengembangkan sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik, khususnya di bidang riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat. Hasil kerja sama senantiasa diupayakan untuk dikelola dengan baik demi kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas DRIPM Uninus

sebagai lembaga nirlaba. DRIPM Uninus juga senantiasa merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika dan memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya institusi.

Wallohul Muwafieq Ila Aqwamith Thoriiq.

Bandung, Maret 2021
Direktur,

Dr. Ahmad Khorl, M.M.Pd., M.Pd.I
NIDN. 0428118401

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i	
Deskripsi Umum.....	ii	
Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi.....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Rasionalisasi	1	
B. Dasar Yuridis.....	2	
C. Rencana Strategis	6	
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT		
A. Profil Universitas	8	
B. Visi dan Misi Universitas.....	9	
C. Tujuan	9	
D. Sasaran	10	
E. Profil Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat	10	
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	13	
G. Sasaran	15	
H. Strategi Pencapaian	16	
I. Analisis Kondisi.....	20	
J. Analisis SWOT.....	21	
K. Pengembangan Kapasitas Pengabdian pada Masyarakat.....	24	
BAB III GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
A. Tujuan dan Sasaran	25	
B. Arah Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat	26	
C. Program Strategis dan kebijakan Institusi	28	
D. Program Peningkatan Mutu Pengabdian pada masyarakat.....	28	
E. Program Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan.....	28	
BAB IV PROGRAM STRATEGIK DAN INDIKATOR KINERJA		
A. Orientasi Program Startegik.....	30	
B. Indikator Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat.....	30	
C. Peta Jalan (<i>road map</i>) Program PPM	32	
BAB V IMPLEMENTASI RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIK		
A. Implementasi Rencana dan Program	46	
B. Penjaminan Mutu	47	
C. Sumber Pendanaan.....	49	
D. Pengelolaan Hasil Pengabdian pada masyarakat	50	
BAB VI PENUTUP		51
Daftar Pustaka	52	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Universitas Islam Nusantara mempunyai visi untuk menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Islam Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang Unggul di Tingkat Nasional. Untuk mencapai visi tersebut, Universitas Islam Nusantara diarahkan untuk menjadi *research-based university* dalam proses pembelajaran, pengembangan pengetahuan, inovasi dan pengabdian pada masyarakat, yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan hasil-hasil riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat akan menjadi dasar untuk meningkatkan mutu dalam materi dan proses pembelajaran. Karenanya, peranan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat sangat penting dan menentukan untuk pencapaian visi Universitas Islam Nusantara.

Melalui kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Islam Nusantara berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal, yaitu kekuatan, keunggulan, keunikan asli (*indigenous*) yang terkandung di bumi Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh Universitas Islam Nusantara, potensi lokal tersebut harus dikembangkan secara kreatif dan kritis sehingga mampu untuk disejajarkan dan dikompetisikan pada tataran internasional. Kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat diarahkan juga untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Suasana riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang kuat dan dinamis menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kapasitas para dosen, meningkatkan mutu kegiatan dan hasil riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Islam Nusantara. Kerjasama sinergis antara Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pusat Studi dan Laboratorium riset, yang dikelola langsung di bawah DRIPM maupun yang tersebar di fakultas, harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan suasana riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang makin kondusif di Universitas Islam Nusantara.

Hasil-hasil kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat harus disebarluaskan melalui berbagai media, seperti pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dan buku ilmiah. Akibatnya, kontribusi Universitas Islam Nusantara diharapkan semakin meningkat dalam pencapaian indikator kinerja riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat diharapkan juga menjadi sarana untuk menghasilkan, baik para peneliti maupun para pengabdian.

Berdasarkan rasionalisasi tersebut di atas, Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Islam Nusantara disusun untuk menjadi pedoman, arah pengembangan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pemanfaatan hasil-hasil riset, inovasi dan pengabdian pada

masyarakat untuk jangka waktu 2020 – 2025. Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat memuat pengabdian pada masyarakat yang diunggulkan dan peta jalan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat untuk pemenuhan visi Universitas Islam Nusantara.

Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat juga memuat garis-garis besar pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat ini perlu dievaluasi secara berkala setiap tahunnya dan jika perlu dikoreksi agar tetap sejalan dengan berbagai perubahan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Universitas Islam Nusantara.

B. Dasar Yuridis

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa riset di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”.

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan riset, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam

penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristek dikti mempunyai misi yaitu 1). Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas.

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan pengabdian di perguruan tinggi adalah:

1. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permen Ristek dikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
4. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan criteria minimal yang meliputi: a) Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian pada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian pada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian pada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian pada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Standar penilaian pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian pada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,

dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) penilaian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat.

5. Standar pelaksana pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian pada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian pada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian pada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian pada masyarakat dengan bentuk direktorat riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian pada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat, memberikan penghargaan kepada

pelaksana pengabdian pada masyarakat yang berprestasi, mendaya gunakan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian pada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian pada masyarakat.

C. Rencana Strategis

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Universitas Islam Nusantara menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2015 yang dicanangkan dalam dokumen Renstra Uninus 2020 – 2035. Renstra tersebut disusun melalui pengkajian yang mendalam, mengacu pada isu-isu internal maupun eksternal. Prioritas pengembangan Uninus diarahkan untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang modern yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan bermutu yang berarti bermutu dalam aspek layanan dan proses belajar mengajar sehingga mempunyai daya saing tidak hanya di tingkat lokal dan nasional tetapi juga di tingkat internasional.

Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) Uninus 2020 – 2025 merupakan sebuah pedoman dan arahan kebijakan bagi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang telah digariskan oleh Uninus dalam rangka mendukung akselerasi pengembangan Uninus. Terdapat lima aspek yang mendukung penyusunan RIPPM ini, yaitu visi dan misi universitas, riwayat perkembangan dan capaian pengabdian pada masyarakat, peran unit kerja pengelola pengabdian pada masyarakat, potensi yang dimiliki pada bidang pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kapasitas pengabdian pada masyarakat. Adapun aspek yang menjadi perhatian dalam bidang pengabdian pada masyarakat ialah sebagai berikut,

1. Lingkungan, SDA dan Energi
2. Kedaulatan Pangan
3. Pengembangan SDM dan Humaniora
4. Regulasi dan Kebijakan Publik
5. Perekonomian/Koperasi

6. Teknologi Terapan/Manufaktur
7. Teknologi Informasi
8. Kesejahteraan Masyarakat
9. Pendidikan

Beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi target Uninus yang tertuang dalam visi Uninus adalah menjadi perguruan tinggi Islam Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang Unggul di Tingkat Nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemangku kepentingan harus mampu menciptakan suasana pengabdian pada masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman yang berbasis pada teknologi informasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misi Uninus diabdikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, inovasi dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan sosial.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Profil Universitas

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) berdiri pada tanggal 30 November 1959, yang pada awalnya bernama Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU). Kehadirannya di Bumi Nusantara merupakan wujud cita-cita para ulama yang berhimpun dalam Keluarga Besar Ahlussunnah Waljamaah, dan umat Islam umumnya. Uninus merupakan amanat cita-cita para ulama sekaligus bukti bakti peran serta mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuju ke arah tercapainya masyarakat adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahuwata'ala.

Dalam menunaikan Tridharma, sejak awal berdiri Uninus menganut sistem terpadu. Suatu sistem yang dijabarkan ke dalam pengembangan dan pembinaan program-program pendidikan, riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang dipandang paling strategis. Semua itu guna menunjang keberhasilan pembangunan dengan mengindahkan keserasian, keselarasan dan kelestarian nilai-nilai duniyah (keislaman) dengan nilai-nilai ilmiah (ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora) serta segi amaliyah dari kedua nilai tersebut.

Gejolak perkembangan kehidupan sosial dan politik di seluruh Nusantara sekitar 1965-1966 turut mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat beserta peraturannya, termasuk dunia perguruan tinggi. Suasana kehidupan kampus dengan kegiatan Tridharmanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena segenap sivitas akademika terpanggil untuk bersama-sama dengan para eksponen Angkatan 1966 lainnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selepas gejolak sosial dan politik 1965-1966, segenap unsur sivitas akademika UNNU bersama dengan unsur sivitas akademika dari perguruan tinggi lain, seperti Akademi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Muhammadiyah Bandung sepakat untuk bergabung (merger), sehingga lahirlah Universitas Islam Nusantara yang berada di bawah pembinaan Yayasan Islam Nusantara. Kesepakatan ini membuat semua potensi yang ada dapat dihimpun dan dimanfaatkan lebih efektif dalam menata suatu perguruan tinggi yang bernafaskan Islam sebagai kebanggaan masyarakat dan bangsa.

Hingga saat ini, Uninus membina 7 (tujuh) fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Agama Islam. Adapun selain penyelenggaraan program sarjana (Strata 1), Uninus juga membina Program Pascasarjana (PPs) yang mengelola 3 (tiga) program studi, yaitu program studi Ilmu Pendidikan, program studi Hukum, dan program studi Pendidikan Agama Islam. Apabila ditinjau dari komposisi tenaga edukatif, Uninus membina dosen tetap yang berjumlah 271 orang, dengan 214 dosen tetap yayasan dan 57 orang dosen PNS DPK.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadi perguruan tinggi Islam Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang Unggul di Tingkat Nasional.

2. MISI

- a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang unggul, yang didasarkan pada empat pilar pendidikan universal, yaitu learning to know, learning to do learning to be, dan learning to live together;
- b) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air;
- c) Mengintegrasikan dan menyiarkan nilai-nilai Islam Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya;
- d) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan Tridharma dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan; dan
- e) Menyelenggarakan tata kelola universitas sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan insan akademik yang berkepribadian Islami, menguasai ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya, dan peka terhadap tuntutan perubahan dan tantangan masa depan, serta mempunyai kemampuan adaptabilitas yang tinggi terhadap jamannya;
2. Mewujudkan program pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada mahasiswa (*student oriented*) dan berbasis penyelesaian masalah (*problem based learning*) pada jenis pendidikan formal di jenjang pendidikan Sarjana (Strata I), Magister (Strata II), dan Doktor (Strata III);
3. Menjadikan kegiatan penelitian sebagai perwujudan dalam rangka pendidikan dan pembelajaran, penemuan dan penambahan khasanah keilmuan, inovasi dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian yang dibina;
4. Menghasilkan program-program pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan keterkaitan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian yang dibina;
5. Mewujudkan kegiatan pembinaan Softskills bagi sivitas akademika dalam upaya membina nilai-nilai (*values*) lama yang baik, serta menggali nilai-nilai (*values*) baru yang lebih baik sebagai katalisator pembentukan karakter individu yang fathonah, amanah, shidiq dan tabligh.

D. SASARAN

- 1) Melaksanakan pengembangan budaya akademik dalam kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah dan religius;
- 2) Melaksanakan kerja sama berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak meliputi program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Melaksanakan penggalangan dana untuk memperkuat dan meningkatkan mutu, produktivitas dan kinerja program studi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta dikelola secara profesional;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu internal;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia serta secara periodik mengembangkan rasio kecukupan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan stakeholders (pengguna layanan dan lulusan), sistem pembelajaran yang sistematis dan sistemik, serta suasana akademik yang kondusif;
- 7) Memenuhi kecukupan aspek pembiayaan, sarana dan prasarana pendukung, serta pengelolaan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya penelitian ilmiah, kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan.

E. Profil Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (DRIPM) Uninus

Kesadaran atas perlunya pengelolaan secara terstruktur Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi dasar fundamental dalam menginisiasi pembentukan lembaga yang secara khusus mengoordinasikan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Nusantara (Uninus) di penghujung tahun 1971. Pada tanggal 15 April 1972, **Sukrama Wirnaputra** yang menjabat sebagai Rektor saat itu kemudian menetapkan pembentukan dua lembaga yang berfungsi sebagai perangkat kelengkapan rektoriat melalui SK Rektor Uninus nomor: 016–Kep/R-UIN/IV/1972 yaitu tentang Pembentukan Pusat Penelitian dan Pusat Layanan Pelatihan bagi Masyarakat. Adapun jabatan Ketua Pusat Penelitian dirangkap oleh **Tb. Abin S. Ma'mun** yang juga menjabat sebagai Pembantu Rektor, sedangkan jabatan Ketua Pusat Layanan Pelatihan bagi Masyarakat dirangkap oleh **Ibrahim A. Effendi** yang juga sedang menjabat sebagai Pembantu Rektor saat itu. Tujuan utama yang hendak direalisasikan oleh kedua lembaga tersebut ialah meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi, serta menyukseskan Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) di bidang pendidikan pada program Pembangunan Lima Tahun tahap I (Pelita I, 1 April 1969 – 31 Maret 1974).

Dinamika dunia pendidikan yang terjadi pada tahun 1978 turut mempengaruhi pola kebijakan serta struktur organisasi yang diimplementasikan di lembaga pendidikan tinggi. Pemberlakuan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

nomor: 046a/U/1977 yang mewajibkan perguruan tinggi, baik yang berstatus negeri maupun swasta, untuk menyusun serta memiliki statuta berdampak pada pengintegrasian Pusat Penelitian dan Pusat Layanan Pelatihan bagi Masyarakat. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan melalui keputusan Rektor Uninus, yang pada saat itu dijabat oleh **M. Nawawi**, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan nomor: 027/Kep-R/UIN/XII/1978 pada tanggal 30 November 1978. Ketika itu, jabatan Ketua LPPM diamanatkan kepada **Achmad Sanusi** dengan mempertimbangkan figurnya sebagai salah satu pendiri Uninus, serta memiliki jaringan kerjasama yang luas. Adapun tujuan pembentukan unsur organisasi perangkat rektor tersebut, selain realisasi dari amanat statuta Uninus, juga berperan sebagai salah satu delegasi perguruan tinggi dalam penyediaan berbagai data dan informasi yang diperlukan oleh pihak pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap III (Repelita III, 1 April 1979 – 31 Maret 1984).

Seiring meningkatnya animo masyarakat di bidang hukum dan ekonomi, maka di tahun 1983 LPPM kemudian membentuk dua pusat studi, yaitu Pusat Kajian Ilmu Hukum dan Pusat Kajian Ilmu Ekonomi. Pembentukan kedua pusat studi tersebut ditetapkan oleh Ahmad Sanusi sebagai Ketua LPPM saat itu dengan SK Ketua LPPM bernomor: 030-SK/LPPM/UIN/IV/1983 tentang Pembentukan Pusat Studi di lingkungan LPPM Uninus pada tanggal 15 April 1983. Tujuan dibentuknya pusat studi itu antara lain untuk mengkaji secara logik akademis terhadap berbagai teori maupun konsep yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan di bidang hukum dan ekonomi. Selain itu juga, kedua pusat studi tersebut memberikan sumbang pemikiran terhadap dinamika serta fenomena yang muncul di bidang hukum maupun ekonomi, sehingga layak untuk dijadikan topik penelitian skripsi. Adapun kontribusi dari kedua pusat studi tersebut berupa kritik konstruktif dan pemikiran inovatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bidang hukum dan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat. LPPM Uninus juga mulai menjalin kemitraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada lingkup hukum dan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian daerah.

Periode selanjutnya di tahun 1988, ketika **Mohammad Shodiq** menjabat sebagai Ketua LPPM Uninus, dibentuk pusat studi lainnya, yaitu Pusat Kajian Ilmu Pendidikan dan Pusat Studi Ilmu Agama Islam. Pembentukan pusat studi tersebut merupakan dampak yang positif dari penggabungan (*merger*) Akademi Pendidikan Agama Islam menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan di Uninus. Penambahan dua pusat studi tersebut ditetapkan melalui SK Ketua LPPM Uninus dengan nomor: 015-Kep/Ka-LPPM/UIN/XII/1988 tentang Pembentukan Pusat Kajian Ilmu Pendidikan dan Pusat Studi Ilmu Agama Islam pada tanggal 30 November 1988. Adapun tujuan dibentuknya dua pusat kajian tersebut tiada lain untuk memfasilitasi sivitas akademika serta praktisi pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap konsep pembelajaran konstruktif dan pengembangan model pembelajaran di jenjang pendidikan menengah maupun tinggi. Pada periode ini, LPPM Uninus telah menjalin kemitraan dengan sebagian besar pondok pesantren di wilayah Jawa Barat dengan berfokus pada perluasan

dan pemerataan akses pendidikan bagi para santri yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

Pembentukan pusat studi selanjutnya dilakukan pada periode kepemimpinan selanjutnya, yaitu ketika Ketua LPPM Uninus dijabat oleh **Dadang Suherman** pada tahun 1993. Pusat studi yang dibentuk pada saat itu ialah Pusat Kajian Psikologi dan Pusat Kajian Pembinaan Keluarga dengan dasar TAP MPR Nomor: II/MPR/1978 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penambahan dua pusat studi tersebut ditetapkan melalui SK Ketua LPPM Uninus dengan nomor: 030-SK/LPPM-UIN/IV/1993 tentang Pembentukan Pusat Kajian Psikologi dan Pusat Kajian Pembinaan Keluarga pada tanggal 15 April 1993. Adapun tujuan dibentuknya dua pusat kajian tersebut tiada lain untuk turut berpartisipasi aktif dalam program Departemen Dalam Negeri RI yang menyoroti tentang pemberdayaan kaum perempuan serta gerakan pembinaan dan kesejahteraan keluarga, pada periode ini, LPPM Uninus juga diberi amanah oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengelola Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) untuk wilayah Bandung dan Banten.

Pada periode selanjutnya, yaitu ketika Ketua LPPM Uninus dijabat oleh **Dr. Ikka Kartika AF, M.Pd.** pada tahun 2001 s.d 2013. LPPM Uninus menjalin kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dengan fokus memberikan penyuluhan, pembinaan serta pelatihan kepada TP PKK tingkat kecamatan di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat serta Diklat Profesi Pendidik PAUD bekerjasama dengan Ditjen PNF.

Pada periode selanjutnya, yaitu ketika Ketua LPPM Uninus dijabat oleh **H. R. Rubi Robana, Ir., M.Sc,** dan Sekretaris Lembaga oleh **Dr. Achmad Mudrikah, M.Pd,** pada tahun 2014 s.d 2016, dengan adanya perubahan struktural karena Dr. Achmad Mudrikah, M.Pd, diangkat menjadi wakil rektor II bidang penjaminan mutu dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat sehingga berdasarkan keputusan Rektor Sekretaris Lembaga digantikan oleh **Dr. Muhammad Andriana Gaffar, M.MPd,** pada tahun 2016 s.d 2017, LPPM Uninus masih membina 10 (sepuluh) pusat studi maupun kajian di berbagai bidang keilmuan, yaitu Pusat Kajian Ilmu Hukum, Pusat Kajian Ilmu Ekonomi, Pusat Kajian Ilmu Pendidikan, Pusat Studi Ilmu Agama Islam, Pusat Kajian Psikologi, Pusat Kajian Pembinaan Keluarga, Pusat Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Studi Ilmu Pertanian, Pusat Studi Kewanitaan dan Gender, serta Pusat Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. LPPM Uninus juga telah mengembangkan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan 12 instansi pemerintah tingkat pusat, 25 instansi pemerintah tingkat provinsi, 21 instansi pemerintah tingkat kabupaten dan kota, 19 instansi pemerintah tingkat kecamatan, 8 perusahaan swasta berskala nasional, 15 perusahaan swasta berskala regional, serta berbagai lembaga pendidikan informal maupun non-formal di wilayah Jawa Barat dan Banten. LPPM Uninus senantiasa berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif agar sivitas akademika secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.

Pada periode selanjutnya, yaitu berdasarkan SK Rektor Nomor: 445/Kep./R-UIN/XII/2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Nusantara, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh; **Dr.**

Ibrahim Danuwikarsa, MS, dan Sekretaris Lembaga oleh **Dr. Ahmad Khorri, M.MPd., M.Pd.I**, serta perampingan struktur LPPM yang pada awal mulanya membina 10 pusat studi pada periode ini mengelola Pusat Publikasi Ilmiah dan Pusat Pengembangan Pengkajian Islam. Salah satu capaian gemilang pada periode ini adalah kenaikan klaster penelitian, yang awalnya klaster madya pada tahun 2013 s.d 2018. Pada posisi klaster “**MADYA**”. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Penguatan Riset & Pengembangan No: **B/850/E2.4/RS.04/2019 Jakarta, 19 November 2019 Klaster Penelitian Uninus meningkat pada posisi klaster “UTAMA”**. Sedangkan pengabdian masyarakat sebelumnya pada posisi “**TIDAK MEMUASKAN**”. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Penguatan Riset & Pengembangan No: **B/990/E3.3/RA.03/2019 Jakarta, 05 November 2019 meningkat pada posisi klaster “MEMUASKAN”**.

Pada periode 2020 - 2025, nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Uninus juga dirubah menjadi Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (DRIPM) Uninus. Berdasarkan SK Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara Bandung Nomor: 098/SKep/YPUINB/1/2020 Tentang Pengangkatan Direktur Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat serta menetapkan sdr. **Dr. Ahmad Khorri, M.M.Pd., M.Pd.I** (NIDN. 0428118401) sebagai Direktur di Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Nusantara dan Sekretaris DRIPM oleh Sdr. **Iden Rainal Ihsan, S.Pd., M.PMat** (NIDN. 0424018901),

Seiring berjalannya waktu DRIPM Uninus juga senantiasa merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika dan memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya institusi. Kiprah DRIPM Uninus sebagai fasilitator kegiatan Riset, Inovasi dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika Uninus senantiasa ditingkatkan seiring dengan estafet kepemimpinan dari masa ke masa. Hal tersebut tiada lain guna mewujudkan visi dan misi Universitas Islam Nusantara untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan mandiri.

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI

Visi DRIPM Uninus ialah menjadi “Direktorat Riset, Inovasi dan pengabdian masyarakat yang mandiri dan unggul”.

MISI

Misi DRIPM Uninus dalam upaya mewujudkan visinya ialah sebagai berikut,

1. Menyelenggarakan program penelitian yang terpadu, berorientasi pada inovasi dan keunggulan institusi serta selaras dengan program pembangunan Nasional;
2. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang terpadu, berorientasi pada inovasi dan keunggulan institusi serta selaras dengan program pembangunan Nasional;
3. Mengintegrasikan dan menyiarkan nilai-nilai Islam Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya;

4. Senantiasa bergerak kearah yang lebih baik berlandaskan pada al-qur'an, al-hadist, ijma' dan qiyas;
5. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, dan
6. Menyelenggarakan tata kelola lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*.

TUJUAN

Tujuan DRIPM Uninus dalam upaya mewujudkan visi dan misinya ialah sebagai berikut,

1. Menghasilkan *Master Plan* program penelitian yang terpadu, berorientasi pada inovasi dan keunggulan institusi, serta mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
2. Menghasilkan *Master Plan* program pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan penelitian dan diseminasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada prinsip *Continuous Improvement (Kaizen)*;
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan prinsip *Good PRACTICE* dalam rangka peningkatan produktivitas kinerja dan kualitas pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh personalia lembaga kepada pihak *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan), baik yang bersifat internal maupun eksternal;
5. Membina serta mengembangkan pusat studi maupun pusat kajian keilmuan yang secara intensif berinovasi, berinovasi maupun menginduksi pengetahuan yang bernuansa ipteks guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan nilai teleologik, baik yang bersifat teoretis ataupun praktis, bagi sivitas akademik dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan keilmuan serta solusi alternatif terhadap berbagai persoalan yang *urgent* untuk diselesaikan di lingkungan sosial kemasyarakatan;
7. Menghasilkan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah, lembaga nirlaba milik masyarakat, dan perusahaan swasta guna menunjang program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan.

G. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai oleh DRIPM Uninus guna merealisasikan visi, misi dan tujuannya ialah sebagai berikut,

1. Peningkatan produktivitas maupun efisiensi kinerja penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika, serta selaras dengan *Master Plan* program penelitian yang terpadu, berorientasi pada inovasi dan keunggulan institusi, serta mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
2. Peningkatan produktivitas maupun efisiensi kinerja pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika, serta selaras dengan *Master Plan* program pengabdian pada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan penelitian dan diseminasi, serta pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada prinsip *Continuous Improvement (Kaizen)*;
4. Penyelenggaraan tata kelola lembaga sesuai dengan prinsip *Good PRACTICE (Participative, Regulative, Accountable, Commitment to Quality, Transparant, Inclusive, Communicative, Effective and Efficient)*;
5. Pembinaan dan pengembangan pusat studi maupun pusat kajian keilmuan yang secara intensif berinovasi, berinovasi maupun menginduksi pengetahuan yang bernuansa ipteks guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dipegang oleh sivitas akademika, serta pemberian bantuan hukum terhadap penyalahgunaan hak-hak tersebut;
7. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi dan publikasi hasil riset serta pengabdian pada masyarakat yang memberikan nilai teleologik, baik yang bersifat teoritis ataupun praktis, bagi sivitas akademik dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan keilmuan serta solusi alternatif terhadap berbagai persoalan yang *urgent* untuk diselesaikan di lingkungan sosial kemasyarakatan;
8. Peningkatan realisasi perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah, lembaga nirlaba milik masyarakat, dan perusahaan swasta guna menunjang program riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan.

Nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh kegiatan DRIPM Uninus ialah nilai-nilai kejujuran (*Shidiq*), bertanggung jawab (*Amanah*), mendidik dan komunikatif (*Tabligh*), dan cerdas (*Fathonah*). Nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan menjadi enam sistem nilai, yaitu 1) Nilai Teologis, yaitu nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Nilai Fisiologis, yaitu nilai dasar fisik dan fungsi fisiologis; 3) Nilai Logis, yaitu nilai dasar logika dan sistematika; 4) Nilai Etis, yaitu nilai dasar etika; 5) Nilai Estetis, yaitu nilai dasar estetika dan keindahan; dan 6) Nilai Teleologis, yaitu nilai dasar kemanfaatan.

H. Strategi Pencapaian

Strategi yang diimplementasikan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh DRIPM Uninus ialah sebagai berikut,

1. Strategi Pencapaian Jangka Pendek (1 tahun)

- a) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 50% dari total populasi sivitas akademika;
- b) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 25% dari total populasi sivitas akademika;
- c) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 40% dari total populasi sivitas akademika;
- d) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 20% dari total populasi sivitas akademika;
- e) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal penelitian yang bidang keilmuannya merepresentasikan topik penelitian yang diusulkan oleh sivitas akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 10% dari total sivitas akademika yang eligible;
- f) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal pengabdian pada masyarakat yang bidang keahliannya merepresentasikan topik pengabdian yang diusulkan oleh sivitas akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 5% dari total sivitas akademika yang eligible;
- g) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 50% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- h) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 30% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- i) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- j) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 40% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- k) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 50% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- l) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 30% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;

- m) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- n) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 40% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- o) Pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), penerapan Teknologi Tepat Guna, penerbitan buku yang ber-ISBN, serta bentuk invensi lainnya dengan tingkat perolehan sebesar 25% dari total hasil penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- p) Peningkatan kuantitas maupun kualitas jurnal ilmiah elektronik (*e-Journal*) sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian yang dibina oleh institusi dengan tingkat pencapaian sebesar 50% dari total bidang keilmuan dan keahlian yang dibina;
- q) Peningkatan kuantitas serta kualitas jalinan kerja sama dan nota kesepahaman dengan instansi maupun institusi lain guna menunjang kinerja penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan tingkat pencapaian sebesar 20% dari agenda kerja sama yang telah ditetapkan;
- r) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan administratif yang diselenggarakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan tingkat realisasi sebesar 50% dari rencana pembiayaan belanja non-operasional yang telah ditetapkan.

2. Strategi Pencapaian Jangka Menengah (3 tahun)

- a) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 70% dari total populasi sivitas akademika;
- b) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 50% dari total populasi sivitas akademika;
- c) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 60% dari total populasi sivitas akademika;
- d) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 40% dari total populasi sivitas akademika;
- e) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal penelitian yang bidang keilmuannya merepresentasikan topik penelitian yang diusulkan oleh sivitas akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 30% dari total sivitas akademika yang eligible;
- f) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal pengabdian pada masyarakat yang bidang keahliannya merepresentasikan topik pengabdian yang diusulkan oleh sivitas

- akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 15% dari total sivitas akademika yang eligible;
- g) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - h) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 40% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - i) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 70% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - j) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 50% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - k) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - l) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 40% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - m) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 70% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - n) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 50% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - o) Pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), penerapan Teknologi Tepat Guna, penerbitan buku yang ber-ISBN, serta bentuk invensi lainnya dengan tingkat perolehan sebesar 35% dari total hasil penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
 - p) Peningkatan kuantitas maupun kualitas jurnal ilmiah elektronik (*e-Journal*) sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian yang dibina oleh institusi dengan tingkat pencapaian sebesar 60% dari total bidang keilmuan dan keahlian yang dibina;
 - q) Peningkatan kuantitas serta kualitas jalinan kerja sama dan nota kesepahaman dengan instansi maupun institusi lain guna menunjang kinerja penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan tingkat pencapaian sebesar 40% dari agenda kerja sama yang telah ditetapkan;
 - r) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan administratif yang diselenggarakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan tingkat realisasi sebesar 60% dari rencana pembiayaan belanja non-operasional yang telah ditetapkan.

3. Strategi Pencapaian Jangka Panjang (5 tahun)

- a) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 80% dari total populasi sivitas akademika;
- b) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma penelitian yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 60% dari total populasi sivitas akademika;
- c) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat mandiri dengan tingkat partisipasi sebesar 70% dari total populasi sivitas akademika;
- d) Stimulasi terhadap sivitas akademika untuk melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat yang bersifat hibah dengan tingkat partisipasi sebesar 50% dari total populasi sivitas akademika;
- e) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal penelitian yang bidang keilmuannya merepresentasikan topik penelitian yang diusulkan oleh sivitas akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 50% dari total sivitas akademika yang eligible;
- f) Rekrutasi dan seleksi personil reviewer internal pengabdian pada masyarakat yang bidang keahliannya merepresentasikan topik pengabdian yang diusulkan oleh sivitas akademika dengan jumlah rekrutmen sebanyak 25% dari total sivitas akademika yang eligible;
- g) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 80% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- h) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- i) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 90% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- j) Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 70% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- k) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian nasional terakreditasi dengan tingkat publikasi sebesar 70% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- l) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian internasional bereputasi dengan tingkat publikasi sebesar 50% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- m) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf nasional dengan tingkat publikasi sebesar 80% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;

- n) Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian pada forum ilmiah yang bertaraf internasional dengan tingkat publikasi sebesar 60% dari total penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- o) Pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), penerapan Teknologi Tepat Guna, penerbitan buku yang ber-ISBN, serta bentuk invensi lainnya dengan tingkat perolehan sebesar 60% dari total hasil penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- p) Peningkatan kuantitas maupun kualitas jurnal ilmiah elektronik (*e-Journal*) sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian yang dibina oleh institusi dengan tingkat pencapaian sebesar 80% dari total bidang keilmuan dan keahlian yang dibina;
- q) Peningkatan kuantitas serta kualitas jalinan kerja sama dan nota kesepahaman dengan instansi maupun institusi lain guna menunjang kinerja penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan tingkat pencapaian sebesar 70% dari agenda kerja sama yang telah ditetapkan;
- r) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan administratif yang diselenggarakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan tingkat realisasi sebesar 80% dari rencana pembiayaan belanja non-operasional yang telah ditetapkan.

I. Analisis Kondisi

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi jelas harus menyadari dan menyikapi berbagai tantangan serta terus mengembangkan kemampuannya seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dewasa ini makin menunjukkan intensitas yang cepat dan kompleks, hal ini jelas akan berpengaruh besar pada penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Paling tidak terdapat beberapa tantangan bagi Perguruan Tinggi yang perlu dicermati dan disikapi dengan tepat yaitu :

1. Makin menguatnya kehidupan masyarakat berbasis pengetahuan (*Knowledge Based Society*);
2. Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat dan variatif baik kedalamannya maupun keluasannya;
3. Meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis riset (*Research University*);
4. Meningkatnya tuntutan akan hasil pendidikan (*output pendidikan*) yang bermutu;
5. Meningkatnya tuntutan akan kiprah lulusan pendidikan (*outcome pendidikan*) yang relevan;
6. Meningkatnya tuntutan proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan standar tertentu.

Kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa sekarang ini lebih mendasarkan pada pengetahuan atau masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society/ knowledge*

society), masyarakat yang makin penuh persaingan yang berbasis keunggulan Sumberdaya manusia, semua ini jelas merukan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan termasuk Perguruan Tinggi. Menurut Andy Hargreaves (2003 : xvi), “we live in a knowledge economy, a knowledge society. Knowledge economies are stimulated and driven by creativity and ingenuity. Knowledge society school have to create these qualities, otherwise their people their nations will be left behind.” Adalah tidak mungkin menghadapi tantangan tersebut dengan menggunakan pola pikir masa lalu, tapi diperlukan pola baru yang kreatif inovatif dalam menghadapinya. Kondisi yang demikian sebagai dampak dari perkembangan Iptek yang cepat, sehingga respon biasa sesuai kebiasaan yang ada jelas tidak memadai dan hanya akan menjadikan perguruan tinggi tertinggal dalam persaingan tidak hanya secara global tapi juga secara nasional, regional, dan lokal sekaligus.

Pengetahuan telah menjadi sesuatu yang sangat menentukan, oleh karena itu perolehan dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam konteks peningkatan kinerja organisasi perguruan tinggi. Langkah ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis dalam menghadapi persaingan yang mengglobal, sehingga pengabaianya akan merupakan suatu bencana bagi dunia pendidikan, oleh karena itu diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan pengetahuan itu dalam kerangka pengembangan SDM dalam organisasi.

Dalam masyarakat pengetahuan, perguruan tinggi perlu mendesain organisasinya menjadi organisasi yang mampu menumbuhkan kreativitas dan kecerdasan jika tidak ingin ketinggalan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus mampu mendidik manusia menjadi orang-orang kreatif, inovatif dan pembelajar, dan ini hanya mungkin dilaksanakan bila organisasi perguruan tinggi itu sendiri menjadi organisasi pembelajar dimana seluruh anggota organisasi mampu meningkatkan kemampuan belajarnya dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi PT dalam menghadapi berbagai perubahan, bahkan perlu terus diupayakan lebih jauh agar organisasi PT dapat melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi, dan ini berarti pembelajaran adaptif perlu terus dibarengi dengan pembelajaran generatif yang merupakan ciri dari organisasi pembelajar (*Learning University*).

Dalam hubungan ini belajar dan pembelajaran menjadi kata kunci dalam peningkatan kapasitas pengetahuan, oleh karenanya menjadikan individu sebagai pembelajar merupakan kondisi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi perguruan tinggi melalui pengintegrasian dengan proses organisasi, manajemen, dan Kepemimpinan dan Penelitian apapun yang ingin menjadi bagian dari lembaga pendidikan tinggi jelas sia-sia jika tidak menempatkan belajar sebagai inti kekuatan dalam suatu perguruan tinggi. Untuk itu perguruan tinggi perlu melakukan pengembangan dirinya menjadi perguruan tinggi pembelajar (*Learning University*), sebab hanya dalam kondisi yang demikian seluruh pemangku kepentingan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat benar-benar menjadi manusia pembelajar sebagai ciri penting kehidupan dalam masyarakat berbasis pengetahuan dan perguruan tinggi berbasis riset/penelitian.

J. Analisis SWOT

Dari landasan pengabdian pada masyarakat Universitas Islam Nusantara, maka dapat diketahui analisis SWOT yang merupakan gambaran menyeluruh atas lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhinya arah pengabdian pada masyarakat Universitas Islam Nusantara, faktor internal yang direpresentasikan oleh kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Universitas Islam Nusantara dalam perjalanannya menyongsong masa depan, mencakup antara lain:

1. KEKUATAN

- a) Universitas Islam Nusantara memberikan perhatian dalam pengembangan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan bantuan dana internal untuk digunakan para peneliti sebagai stimuli agar mengikuti kompetisi hibah dan mendorong para peneliti untuk mendapatkan dana pengabdian pada masyarakat dari sumber eksternal.
- b) Kualitas pengabdian pada masyarakat di Universitas Islam Nusantara dirancang berdasarkan renstra dan rencana induk pengembangan kampus serta selalu dikontrol dengan sistem penjaminan mutu yang kuat, agar pengabdian pada masyarakat selalu tetap mengacu pada bidang pengabdian pada masyarakat unggulan serta topik-topik pengabdian pada masyarakat yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat Uninus.
- c) Telah memiliki infrastruktur jaringan internet sehingga peneliti dapat dengan mudah mencari jurnal, ebook, dan referensi-referensi yang terbaru dalam bentuk data digital.
- d) Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai skema pengabdian.

2. KELEMAHAN

- a) Minat melakukan pengabdian pada masyarakat diakui masih kurang jika dilihat dengan potensi SDM yang dimiliki. Banyak dosen yang belum memiliki kepangkatan serta mempunyai kepangkatan asisten ahli dan peneliti lebih tertarik dengan kegiatan praktis yang lebih memberikan profit materi dan popularitas.
- b) Komitmen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar sudah mulai tumbuh dan menguat. Namun demikian kemampuan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat sebagian dosen belum merata.
- c) Pengabdian pada masyarakat belum terarah secara sistematis, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri antar dosen dan tidak memiliki roadmap yang jelas. Hal ini menyebabkan Universitas Islam Nusantara dapat sulit menemukan bentuk unggulannya.
- d) Kompetensi dalam pengelolaan IT masih rendah sehingga daftar acuan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat kurang *up to date*.

Beberapa faktor-faktor eksternal dapat menjadi hambatan sekaligus merupakan peluang yang dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan minat dalam pengabdian pada masyarakat di Universitas Islam Nusantara. Faktor eksternal dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu peluang dan ancaman. Peluang pengabdian pada masyarakat adalah setiap tawaran yang dapat memberi nilai tambah untuk mengembangkan topik pengabdian pada masyarakat yang sedang berkembang di tengah masyarakat, sebaliknya ancaman adalah setiap hambatan yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran jalannya pengabdian pada masyarakat yang di kembangkan di lingkungan Universitas Islam Nusantara.

3. PELUANG

- a) Meningkatnya perhatian pemerintah bagi sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi swasta khususnya bidang pengabdian pada masyarakat sehingga membuka ruang minat dan kompetisi bagi peneliti dan dosen dalam mengembangkan pengabdian pada masyarakat.
- b) Minat pihak eksternal baik industri, universitas maupun pemerintah dalam dan luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pemberian beasiswa atau dana pengabdian pada masyarakat menyebabkan minat masyarakat untuk kuliah meningkat dan iklim pengabdian pada masyarakat di Universitas Islam Nusantara juga meningkat.
- c) Media publikasi ilmiah dan populer semakin banyak baik di dalam maupun luar negeri yang memberikan kesempatan besar bagi Dosen atau peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
- d) Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional serta sertifikasi dosen mempersyaratkan hasil pengabdian pada masyarakat dan publikasinya. Hal ini menuntut semua dosen dan peneliti meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat.
- e) Lingkungan kampus Universitas Islam Nusantara yang nyaman memberikan nuansa kondusif bagi aktivitas akademik, termasuk pengabdian pada masyarakat.
- f) Kompleksitas dinamika wilayah memberikan inspirasi dan menjadi media serta lahan kontribusi bagi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

4. HAMBATAN

- a) Kapasitas dan kualitas perguruan tinggi dalam negeri semakin merata. Hal ini menyebabkan kompetisi mendapatkan hibah pengabdian pada masyarakat semakin ketat.
- b) Meskipun perhatian pemerintah besar pada pendidikan, namun jumlah dana yang dapat diakses Perguruan Tinggi dinilai tidak ada kepastian besaran, jenis, dan jadwalnya. Hal ini sedikit banyak mengganggu pelaksanaan arah pengembangan pengabdian pada masyarakat Perguruan Tinggi.

K. Pengembangan Kapasitas Pengabdian pada Masyarakat

Pengembangan kapasitas pengabdian pada masyarakat dilakukan salah satunya dengan manajemen internal. Secara berkala dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kinerja unit, kontribusi terhadap kinerja dan reputasi akademik secara keseluruhan serta efektifitas penyelenggaraan unit. Evaluasi secara menyeluruh selama ini telah dilakukan secara periodik dengan mengoptimalkan sistem penjaminan mutu yang dapat digunakan sebagai pengembangan yang tepat untuk masing-masing unit.

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di Uninus baik secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan. Kuantitas pengabdian pada masyarakat dosen dalam tiga tahun terakhir memang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kuantitas pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen Uninus relatif rendah dibandingkan dengan aktifitas untuk pendidikan, pengabdian pada masyarakat maupun administratif.

Pengabdian masyarakat merupakan bentuk implementasi hasil pengabdian pada masyarakat dosen kepada *stakeholder*. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan melalui pengabdian secara individual/ personal sesuai dengan minat dosen atau terstruktur melalui lembaga yang ada di institusi yaitu DRIPM (Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat) untuk memberikan pelayanan masyarakat.

Selain itu, rendahnya kuantitas kegiatan pengabdian pada masyarakat juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dosen mengakses sumber pembiayaan. Lingkup pengabdian pada masyarakat masih terbatas pada pelatihan atau penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, dengan materi terkait pada bidang keilmuan masing-masing program studi.

Kegiatan pengabdian ini belum didukung oleh pengabdian pada masyarakat yang inovatif sehingga kegiatannya sporadis dan tidak berkelanjutan. Rendahnya pengabdian pada masyarakat yang inovatif ini disebabkan belum ada sistem informasi terintegrasi pada pengabdian pada masyarakat yang dilihat dari kepuasan dosen dalam dukungan pengabdian pada masyarakat yang kurang mengakibatkan sistem dokumentasi pengabdian pada masyarakat yang tidak terintegrasi sehingga belum berorientasi pada penyelesaian masalah yang ada di masyarakat serta banyak yang tidak berkelanjutan.

BAB III

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) untuk 5 tahun ke depan, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor eksternal (peluang dan tantangan) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) Uninus. Selain itu, juga didasarkan pada ketersediaan sumberdaya, serta dinamika akademis yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. RIP ini merupakan penjabaran dari cita-cita Uninus di bidang Pengabdian pada Masyarakat untuk menjadi Universitas riset yang berdaya saing dan mampu menghasilkan Pengabdian pada Masyarakat bermutu tinggi.

Memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, dalam lima tahun kedepan Uninus secara sadar dan berkelanjutan berusaha meningkatkan pilar pemerataan Pengabdian pada Masyarakat, memperluas akses Pengabdian pada Masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional. Pilar ini diarahkan dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing Uninus di bidang Pengabdian pada Masyarakat pada tingkat nasional dan internasional serta meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu.

1. Tujuan Umum

Tujuan penyusunan RIPPM Uninus 2020-2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, pengembangan, dan penerapan Iptek. Dalam pelaksanaannya memanfaatkan sumberdaya (dosen, pusat-pusat Pengabdian pada Masyarakat dan pusat kajian), fasilitas, dan dana yang tersedia sedemikian hingga diperoleh penguasaan Iptek yang mengalir menjadi produk-produk nyata dan bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan stakeholder lainnya serta mendukung kebutuhan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan mewujudkan kemandirian Uninus. RIPPM Uninus diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen hidup yang dapat menjadi kompas yang akan dituju dalam 5 tahun kedepan oleh peneliti Uninus.

Secara garis besar, sasaran RIPPM Uninus dalam lima tahun kedepan adalah:

- a) Mewujudkan keunggulan Pengabdian Kepada Masyarakat di Uninus;
- b) Meningkatkan daya saing Uninus di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c) Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu;
- d) Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Uninus; dan
- e) Meningkatkan pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengabdian pada Masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a) Terselenggaranya Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan keagamaan maupun yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
- b) Terselenggaranya kajian maupun kegiatan-kegiatan ilmiah serta karya-karya ilmiah lainnya yang didasarkan pada pengembangan ilmu maupun penerapan ilmu untuk pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
- c) Terselenggaranya penerapan model Pengabdian pada Masyarakat, pendampingan maupun pemberdayaan masyarakat untuk turut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya.
- d) Tersebarinya informasi hasil Pengabdian pada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, serta hasil penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

B. Arah Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

Menciptakan suasana atau iklim kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan keagamaan yang didasarkan pada kemampuan intelektual, kepribadian, profesional dan berakhlakul karimah.

1. Sasaran Pelaksanaan

Sasaran pelaksanaan didasarkan pada Renstra Universitas Islam Nusantara yaitu:

- a) Terlaksananya kegiatan-kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang bisa dilaksanakan secara disiplinier melalui kegiatan perorangan atau kelompok.
- b) Terselenggaranya sistem Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka mewujudkan gagasan dan prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah dalam menunjang suksesnya pembangunan.
- c) Terlindunginya hasil-hasil Pengabdian pada Masyarakat yang merupakan hak atas karya intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Terpublikasikannya hasil Pengabdian pada Masyarakat dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah (hasil-hasil Pengabdian pada Masyarakat) dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- e) Hasil-hasil Pengabdian pada Masyarakat yang dinilai memadai kelayakannya dapat disampaikan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak yang dipandang relevan dan memerlukan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, Uninus telah merumuskan program bidang-bidang Pengabdian pada Masyarakat unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan (roadmap) beserta topik-topik Pengabdian pada Masyarakat sampai tahun 2020. Pemilihan Pengabdian pada Masyarakat unggulan dan kompetitif lainnya serta topik-topik

yang terkait didasarkan atas analisis SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan kondisi eksternal Uninus.

2. Arah Pengembangan

Misi Universitas Islam Nusantara adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itu Uninus telah menggariskan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat harus seoptimal mungkin berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di mana Uninus berdomisili, yakni Kota Bandung. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Uninus menetapkan garis besar pengembangan kegiatan pengembangan pengabdian pada masyarakat melalui beberapa tahapan.

- 1) Tahap jangka pendek
 - a) Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kemiskinan dan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;
 - b) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan penerapan Hasil penelitian dan penguatan kegiatan pendidikan dan pengajaran Uninus.
 - c) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - d) Kegiatan pengabdian masyarakat didanai oleh perguruan tinggi dan sebagian kecil didanai melalui kerjasama dengan instansi atau pemerintah.
- 2) Tahap jangka menengah
 - a) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat bermanfaat secara nyata untuk pengembangan UMKM.
 - b) Pendanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari universitas yang bersangkutan, pemerintah maupun swasta.
 - c) Beberapa hasil pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagai model pembinaan masyarakat di tingkat lokal
- 3) Tahap jangka panjang
 - a) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagai model pembinaan dan pengembangan UMKM yang dipatenkan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat khususnya pengembangan UMKM.
 - b) Sumber Pendanaan penelitian dari pemerintah maupun swasta serta internasional semakin besar jumlahnya dan signifikan
 - c) Hasil pengabdian pada masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dirujuk oleh banyak lembaga baik regional, nasional maupun internasional

C. Program Strategis dan Kebijakan Institusi

Program kerja dan kebijakan strategis Uninus periode 2020–2035 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan strategis serta strategi pencapaian yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Secara umum, rencana program peningkatan mutu dan relevansi program pengabdian pada masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya-mampu institusi dalam menghadapi persaingan pada era globalisasi dan desentralisasi agar kegiatan akademiknya dapat terus berkesinambungan (*sustainable*), dengan mempertahankan mutu pendidikan dan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna lulusan (*users*), serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengacu pada rencana pengembangan strategis dan operasional yang telah digariskan, program kerja dan kebijakan strategis disusun merupakan penjabaran secara lebih spesifik pada aspek-aspek pengelolaan aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Adapun program kerja dan kebijakan strategis yang dilaksanakan ialah sebagai berikut,

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengabdian pada masyarakat;
2. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat.

D. Program Peningkatan Mutu Pengabdian pada Masyarakat

Meningkatkan mutu dan produktivitas pengabdian pada masyarakat

Kelompok Program Utama ini diwujudkan melalui kegiatan pengembangan berikut ini,

1. Mengkaji ulang konsep dan prinsip serasi pendekatan dalam pengabdian pada masyarakat;
2. Mengadakan berbagai latihan strategi pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
3. Mengembangkan reward system bagi dosen yang telah melakukan inovasi dalam pengabdian pada masyarakat;
4. Mempublikasikan hasil-hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat;
5. Ikut serta melaksanakan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan maupun pra Jabatan;
6. Memperkuat sinergi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
7. Memperkuat jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha dan industri;
8. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain.

E. Program Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan

Memantapkan dan memperluas hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

Kelompok Program Utama ini bertujuan untuk mendorong agar universitas dapat meningkatkan jalinan kerjasama, jejaring, dan kemitraan pada tingkat nasional dan internasional yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan berikut ini,

1. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga;

2. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan prinsip kesetaraan (equality), saling menghormati (mutual respect), dan saling menguntungkan (mutual benefit);
3. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat bisnis dan industri dalam kaitannya dengan pemasaran lulusan;
4. Memanfaatkan kerjasama dengan sekolah dalam berbagai kegiatan;
5. Mengembangkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi kemasyarakatan dalam upaya membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB IV

PROGRAM STRATEGIK DAN INDIKATOR KINERJA

A. Orientasi Program Strategik

UNINUS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Selaras dengan tugas pokok dan fungsi tersebut serta memperhatikan visi dan dinamika PPM lima tahun terakhir, maka Rencana Induk PPM 2020-2025 ini disepakati bahwa orientasi program pengabdian pada masyarakat terbagi menjadi 10 kategori. Secara rinci, kategori program pengabdian pada masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUIK)
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)
10. Program Penerapan IPTEK Kepada Masyarakat (PPIM)

B. Indikator Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Guna mengukur implementasi dan efektivitas RIPPМ Uninus, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, *output*, dan *outcome*. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian terhadap mutu hasil pengabdian pada masyarakat, yaitu jumlah publikasi meningkat (baik nasional maupun internasional).
2. Capaian terhadap relevansi hasil pengabdian pada masyarakat, yaitu jumlah HKI, paten dan jumlah produktivitas warga binaan.
3. Capaian terhadap budaya pengabdian pada masyarakat, yaitu terbangun budaya mengimplementasikan hasil penelitian di lingkungan Uninus, dan kerjasama dengan pihak lain yang relevan.
4. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi pendidikan sarjana dan pascasarjana di Uninus.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Pengabdian Kepada Masyarakat (IKUPkM)

No	Indikator Kinerja		base line 2020	Indikator capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Publikasi ilmiah	Jurnal	5	10	15	20	25	30
		Jurnal Nasional Terakreditasi	5	10	15	20	25	30
		Jurnal Nasional tidak	10	20	25	30	35	40
		Proseding ilmiah	19	25	30	35	40	45
2	Sebagai pemakalah pertemuan ilmiah	Tingkat nasional	7	25	30	35	40	50
		Tingkat Internasional	12	15	20	25	30	35
3	Pembicara utama (Keynote Speaker) dalam pertemuan ilmiah	Nasional	3	5	10	15	20	25
		Lokal	10	20	30	35	40	45
4	Visiting lecturer	Internasional	-	-	-	1	4	10
5	Hukum Bisnis	Paten	1	2	3	4	5	6
		Hak cipta	5	10	12	15	18	20
		Desain produk	-	-	-	-	-	-
		Perlindungan Varietas	-	2	2	4	5	5
6	Teknologi tepat guna		-	-	-	-	-	-
7	Buku Ajar (ber-ISBN)		5	10	15	20	25	25
8	Jumlah laporan yang tidak		10	15	20	25	30	35
9	Jumlah dana kerjasama penelitian		-	-	-	-	-	-
10	Angka partisipasi dosen yang terlibat dalam penelitian		20%	30%	35%	40%	45%	50%

Kinerja implementasi RIPPМ diukur berdasarkan indikator kinerja kunci (KPI/Key Performance Indicators) yang lebih menitik beratkan pada *out put* dan *out come* hasil penelitian, inovasi dan pengabdian pada masyarakat. Pengukuran kinerja pelaksanaan RIPPМ dilakukan oleh Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (DRIPM) Uninus. Pengukuran dilakukan pada setiap akhir periode pengabdian (satu siklus pengabdian pada masyarakat) dalam satu tahun dari hasil laporan serta hasil publikasi, seminar yang datanya dilaporkan oleh pengabdian ke DRIPM dalam rangka perolehan *reward* pengabdian.

Tabel 4.2 Keterlibatan dosen dalam kegiatan PPM tahun 2021 – 2025

No.	Fakultas	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	FKON	5	10	15	20	25
2	FKUM	5	10	15	20	25
3	FKIP	10	15	20	25	30
4	FTEK	3	6	9	12	25
5	FTAN	4	8	12	16	20
6	FIKOM	3	6	6	12	15
7	FAI	5	10	15	20	25
	Total	35	65	92	125	165

Tabel 4.3 Rekapitulasi kontrak per Kategori PPM dana DIPA UNINUS

No	Skim PPM	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Reguler	15	20	25	30	35
2	Unggulan	10	15	20	25	30
3	Prioritas Bidang	10	20	30	40	45
4	Berbasis Pendidikan Berkelanjutan	15	20	25	30	35
5	Prioritas Fakultas	20	25	30	35	40
	Total	70	100	130	160	180

Tabel 4.4 Rekapitulasi kontrak jenis/skim PPM dana dari RISTEKDIKTI

No	Skim PPM	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	PKW	0	0	-	-	-
2	PKMS	0	0	-	-	-
3	PKW - CSR	0	0	-	-	-
	Total	0	0	-	-	-

Selain itu, tidak sedikit dosen yang terlibat PPM Insidental (diminta oleh lembaga tertentu), baik yang dilayani oleh DRIPM maupun fakultas.

C. Peta Jalan (Roadmap) Program PPM

Pengelompokan bidang PPM ke dalam skema reguler, unggulan, mono tahun dan multi tahun pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah dalam membuat suatu kebijakan dan prioritas pengabdian yang bersifat lokal dan nasional. Dalam upaya untuk mewujudkan visi UNINUS, kegiatan PPM dibagi menjadi dua bidang utama yaitu PPM di

tingkat lokal dan nasional. Secara skematis roadmap PPM dalam lingkup UNINUS adalah sebagai berikut:

1. PPM Reguler

Skema PPM ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kuantitas dosen UNINUS untuk melaksanakan PPM berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki.
- b. Meningkatkan kualitas PPM dosen UNINUS dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian dan atau permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat
- c. Memupuk kesadaran para dosen UNINUS untuk bersedia dan melaksanakan bimbingan mahasiswa dalam kegiatan PPM.

2. PPM Unggulan

Tema PPM Unggulan dapat memilih salah satu dari tiga kategori, yaitu PPM: (a) berbasis penelitian, (b) penciptaan teknologi tepat guna (TTG), dan (c) penciptaan dan penerapan media atau model pembelajaran inovatif.

3. Kompetitif Nasional

a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

b. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus PKMS

Khalayak sasaran program PKMS dapat mencakup: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi

berhasrat kuat menjadi wirausahawan; atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Untuk mitra masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, disyaratkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota 2-3 orang. Mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKMS, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen atau pemasaran. Sedangkan untuk mitra non-produktif kegiatan dapat berupa penanganan permasalahan kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra.

c. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “*bekerja bersama masyarakat*” sebagai pengganti konsep “*bekerja untuk masyarakat*”.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata– Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1/D-4/Sarjana

Terapan, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

Program KKN-PPM dalam jangka panjang harus dapat mewujudkan capaian hasil misalnya meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan emisi CO₂, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan umur harapan hidup dan indikator lainnya.

d. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

Misi PPK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, serta berwawasan ekonomi berbasis pengetahuan. PPK harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga PPK diberi peluang untuk mampu menjadi unit profit.

PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha/PPUPIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Pengelola Program PPK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis para *tenant* yang diutamakan dalam bentuk produk barang/jasa yang unik dan unggul sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya.

Unit layanan PPK membina *tenant* yang telah diseleksi sebanyak 20 orang selama 3 (tiga) tahun. Setiap tahun wajib menghasilkan minimal 5 wirausaha baru mandiri. Seleksi *tenant* baru dilaksanakan untuk menggantikan sejumlah *tenant* yang telah mandiri tersebut, sehingga tiap tahun jumlah *tenant* yang dibina tetap 20 orang. *Tenant* dapat bersifat individu atau kelompok, apabila dalam bentuk kelompok maksimal jumlah anggotanya adalah 3 orang. Dari 20 orang *tenant* dapat membentuk maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. *Tenant* dari alumni dibatasi maksimal 5 orang. *Tenant* dimungkinkan diberikan bantuan untuk pembelian peralatan atau perbaikan sarana produksi yang sifatnya bergulir.

e. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah PPPUD

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha berupaya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi

budaya lokal, untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan substansi dari skema PPPE (Program Pengembangan Produk Ekspor), dan Hi-Link yang terdapat pada panduan edisi sebelumnya maka DRPM mengambil kebijakan untuk melebur kedua skema tersebut menjadi satu dengan skema PPPUD.

Kriteria produk unggulan adalah : a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah.

f. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)

Berkaitan dengan upaya pengembangan budaya ekonomi berbasis pengetahuan, perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud *knowledge and technopark* yang memanfaatkan pengetahuan, pendidikan maupun hasil riset dosen. Dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPUPIK.

Program PPUPIK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud PPUPIK di perguruan tinggi dapat berupa unit usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. PPUPIK dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan kalangan industri lainnya. PPUPIK dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, perencana percontohan, bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, PPUPIK diharapkan dapat semakin berkembang melalui pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang yang ada di masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. Misi program PPUPIK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen yang unggul

dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus.

g. Program Pengembangan Desa Mitra PPDM

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai *icon* dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model *sains-techno and tourism park*. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra *Organic Farming*, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi *science-techno-park* perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

h. Program Kemitraan Wilayah (PKW)

Misi program PKW adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran). Pada awalnya PKW mempunyai 3 bentuk yaitu: PKW-PEMDA, PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Perbedaan yang tegas di antara ketiganya terletak pada sumber dana pendukungnya. Dana program PKW bersumber dari DRPM Ditjen Penguatan Risbang, PEMDA dan/atau CSR.

Usulan program PKW disusun bersama pihak terkait yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra, Pemkab/Pemkot dan/atau CSR. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi wilayah PKW. Acuan yang digunakan dalam menyusun usulan PKW tersebut adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah PKW. PKW dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi (pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lain-lain), lingkungan, administrasi dan pemerintahan desa.

PKW diposisikan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan Pemkab/Pemkot dari RPJMD dan non RPJMD. Dengan demikian, sinergisme yang dibangun dalam PKW diwujudkan dalam bentuk kerja sama kepakaran, pengintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan.

5. Desentralisasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat. Renstra dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. DRPM telah melaksanakan penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi berdasarkan parameter mengacu Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Hasil penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat telah berhasil memetakan perguruan tinggi dalam kluster Unggul, Sangat Bagus, Memuaskan, dan Kurang Memuaskan. Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra perguruan tinggi kluster Unggul dan Sangat Bagus, DRPM merancang sebuah skema pengabdian masyarakat sebagai bentuk desentralisasi program pengabdian kepada masyarakat yaitu Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Dengan demikian PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT.

Pengelolaan PPMUPT meliputi seleksi, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan diserahkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga

berkewajiban melakukan penjaminan mutu setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

6. Penugasan

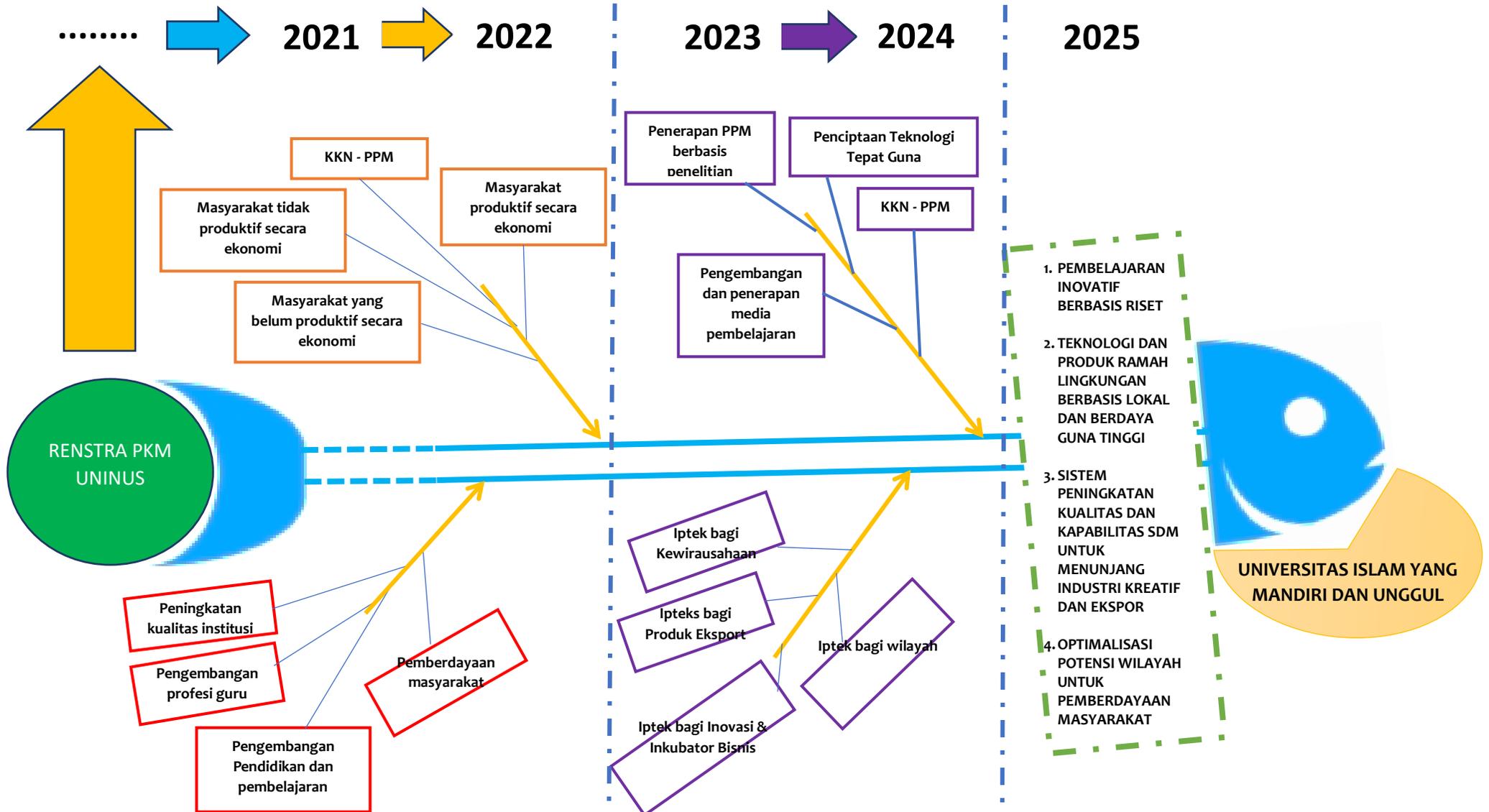
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)

PPIM ditujukan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum seperti kemiskinan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, keamanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kependudukan, sosial politik dan masalah sosial lainnya; dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi produktif seperti masalah produksi, manajemen, dan pemasaran.

Khalayak sasaran (mitra) PPIM dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh lembaga negara/LPK/LPNK. Mitra dari kelompok masyarakat umum seperti karang taruna, dasa wisma, pokdarwis, dan kelompok masyarakat umum lainnya yang ada di desa. Mitra ditentukan minimal dua kelompok masyarakat umum, atau dua kelompok masyarakat ekonomi produktif; atau satu kelompok masyarakat umum dan satu kelompok masyarakat ekonomi produktif. Bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam PPIM merupakan program prioritas yang sudah ditentukan.

Implementasi skema PPIM dilaksanakan dengan mengacu kepada hasil penilaian kinerja PT dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Hasil analisis penilaian kinerja ini, utamanya kompetensi perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas hilirisasi Iptek kepada masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

ROADMAP/PETA JALAN PENGABDIAN



Gambar 1.2 Roadmap PPM UNINUS

A. Isu Strategis: PPM Berbasis Pendidikan Karakter

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan Pengabdian					Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (IKPM) dan Target				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
								IKPM				
PPM berbasis pengembangan Kultur Sekolah.	1. Pemetaan prototipe kultur sekolah. 2. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Pemberdayaan siswa. 4. Pemberadayaan Komite Sekolah.	Terjadi peningkatan kultur sekolah.	Pemetaan prototipe kultur sekolah, dan pemberdayaan pendidik di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Pemberdayaan tenaga kependidikan di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Pemberdayaan siswa di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Pemberdayaan komite sekolah di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Pemberdayaan pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan komite sekolah secara terintegrasi di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.
								Target	Target	Target	Target	Target
								Terlaksananya kegiatan Pemetaan prototipe kultur sekolah, dan pemberdayaan pendidik di Pendidikan Dasar dan Menengah	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan tenaga kependikan di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan siswa di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan komite sekolah di Pendidikan Dasar dan Menengah.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pimpinan pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan komite sekolah secara terintegrasi di Pendidikan Dasar dan Menengah. Terjadi peningkatan kultur sekolah.

B. Isu Strategis: PPM Berbasis Riset untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan Pengabdian					Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (IKPM) dan Target				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
								IKPM				
PPM berbasis peningkatan kualitas pendidikan.	1. Pengembangan Profesi Guru 2. Pengembangan kurikulum 3. Pengembangan manajemen 4. Pengembangan perangkat pembelajaran. 5. Pengembangan sistem penilaian hasil belajar.	Terjadi peningkatan profesionalitas guru.	<i>Need assessment dan workshop pengembangan profesi guru.</i>	<i>Workshop pengembangan kurikulum.</i>	Pelatihan dan pendampingan pengembangan manajemen pendidikan/ sekolah.	Pelatihan dan pendampingan pengembangan perangkat pembelajaran.	Pelatihan dan pendampingan sistem penilaian hasil belajar.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.
								Target	Target	Target	Target	Target
								Teridentifikasi persoalan dan potensi pengembangan profesi guru.	Terlaksana kegiatan <i>workshop</i> pengembangan kurikulum.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan manajemen pendidikan/ sekolah.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan penilaian hasil belajar.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan sistem penilaian hasil belajar.
							Terlaksana <i>workshop</i> pengembangan profesi guru.				Terjadi peningkatan profesionalitas guru.	

C. Isu Strategis: PPM Pengembangan Usaha

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan PPM					Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (IKPM) dan Target				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
			IKPM					2021	2022	2023	2024	2025
PPM berbasis kewirausahaan	1. Pemanfaatan barang bekas/limbah menjadi produk baru.	Terjadi peningkatan nilai ekonomis produk (peningkatan keuntungan).	<i>Need assessment</i> potensi dan pelatihan pemanfaatan barang bekas/limbah menjadi barang baru.	Pelatihan pendampingan serta seminar	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional			
	2. Diversifikasi makanan lokal.							Target	Target	Target	Target	Target
	3. Industri kreatif.							Teridentifikasi potensi dan permasalahan pemanfaatan barang bekas/limbah menjadi produk baru.	Terlaksana kegiatan PPM untuk mengatasi permasalahan diversifikasi makanan lokal.	Terlaksana kegiatan PPM untuk mengatasi permasalahan industri kreatif.	Terlaksana kegiatan PPM untuk mengatasi permasalahan kerajinan berbahan baku lokal.	Terlaksana kegiatan PPM untuk mengatasi permasalahan pengembangan produk pertanian.
	4. Kerajinan berbahan baku lokal.											Terjadi peningkatan nilai ekonomis produk (peningkatan keuntungan).
	5. Pengembangan produk pertanian.											

D. Isu Strategis: PPM Berbasis Produk Ekspor

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan Penelitian					Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (IKPM) dan Target				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
								IKPM				
PPM berbasis produk ekspor	1. Pengembangan SDM UKM produk ekspor.	Terjadinya peningkatan nilai ekspor UKM di Jawa Barat.	Pelatihan pendampingan serta seminar pengembangan SDM UKM produk ekspor.	Pelatihan pendampingan serta seminar pengembangan dalam pengadaan bahan baku produk ekspor.	Pelatihan pendampingan serta <i>work - shop</i> peningkatan proses produksi .	Pelatihan dan pendampingan perluasan jaringan pemasaran produk ekspor.	Pelatihan pendampingan serta <i>work shop standarisasi produk</i> ekspor.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.
	Target							Target	Target	Target	Target	
	Terlaksana kegiatan pelatihan pendampingan serta seminar pengembangan SDM UKM produk ekspor.							Terlaksana kegiatan pelatihan pendampingan serta seminar pengembangan dalam pengadaan bahan baku produk ekspor.	Terlaksana kegiatan pelatihan pendampingan serta <i>work - shop</i> peningkatan proses produksi.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan perluasan jaringan pemasaran produk ekspor.	Terlaksana kegiatan pelatihan pendampingan serta <i>workshop</i> standarisasi produk ekspor. Terjadinya peningkatan nilai ekspor UKM di Jawa Barat.	

E. Isu Strategis: PPM Penguatan Kelembagaan Inkubator Bisnis

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan Pengabdian					Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (IKPM) dan Target				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
								IKPM				
Pengembangan kewirausahaan di kampus.	1. Inkubator Bisnis di bidang Pengolahan limbah plastik. 2. Inkubator Bisnis di bidang busana. 3. Inkubator kewirausahaan di bidang teknik. 4. Inkubator Bisnis di bidang teknologi tepat guna. 5. Inkubator Bisnis di bidang olahraga. 6. Inkubator Bisnis di bidang bahasa. 7. Inkubator Bisnis di bidang seni.	Terjadinya inkubator bisnis budaya kewirausahaan di masing-masing prodi/fakultas di UNINUS	<i>Workshop</i> dan seminar pengembangan inkubator di bidang boga, busana, dan teknik.	<i>Workshop</i> dan seminar pengembangan inkubator di bidang teknologi tepat guna dan Kewirausahaan.	Pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di bidang bahasa dan di bidang seni.	Pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di Pendidikan	Pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di bidang pendidikan di bidang ekonomi.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.	Laporan PPM dan artikel jurnal nasional.
								Target	Target	Target	Target	Target
								Terlaksana kegiatan <i>workshop</i> dan seminar pengembangan inkubator di bidang boga, busana, dan teknik.	Terlaksana kegiatan <i>workshop</i> dan seminar pengembangan inkubator di bidang teknologi tepat guna.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di bidang bahasa dan di bidang seni.	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di bidang olahraga	Terlaksana kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan inkubator di bidang pendidikan di bidang ekonomi. Terjadi inkubator budaya kewirausahaan di masing-masing prodi/fakultas di UNINUS.

BAB V

IMPLEMENTASI RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIK

A. Implementasi Rencana dan Program

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPPM) merupakan bagian dari rencana strategis Uninus yang dibuat secara multitahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung Pengabdian pada Masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana Pengabdian pada Masyarakat.

Secara umum, tahapan kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana digambarkan sebagai berikut,



Gambar. 5.1 Tahapan Kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat
Sumber: <https://lppm.itny.ac.id/panduan-pengusulan-program-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-melalui-simlitabmas>

Adapun jadwal pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat mengacu pada ketentuan Kemenristekdikti RI ialah sebagai berikut,

Tabel. 5. 1 Tabel Tahapan Pengusulan Proposal Pengabdian

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru											
1	Pengumuman pengusulan proposal	■											
2	Batas akhir praproposal		■										
3	Seleksi preproposal			■									
4	Pengumuman praproposal yang lolos				■								
5	Batas akhir proposal lengkap					■							
6	Seleksi proposal lengkap						■	■	■				
7	Pembahasan proposal (jika ada)							■	■				
8	Kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)								■	■	■		
9	Penetapan proposal yang didanai										■	■	
		Penugasan On Going											
10	Pengumuman proposal yang didanai	■											
11	Kontrak dan penugasan		■										
12	Pelaksanaan penugasan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Laporan kemajuan								■				
14	Monitoring dan evaluasi internal									■			
15	Monitoring dan evaluasi eksternal										■	■	
16	Laporan tahunan/akhir											■	■
17	Seminar Hasil											■	■
18	Pengusulan proposal lanjutan											■	■

B. Penjaminan Mutu

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat pada stakeholders sasaran dilakukan melalui evaluasi secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Kedua pengukuran keberhasilan di atas (pengendalian dan peningkatan mutu) menggunakan tolok ukur yang di dalam penjaminan mutu dinyatakan dalam bentuk standar. Standar harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (*continuous improvement* atau *kaizen*). Semakin tinggi standar yang digunakan, semakin bermutu proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan.

Filosofi mutu kinerja mengisyaratkan bahwa setiap pekerjaan menghasilkan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan barang dan/atau jasa itu disebut pelanggan/ customers/ stakeholders. Barang dan/atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggannya, harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Barang dan/atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya.

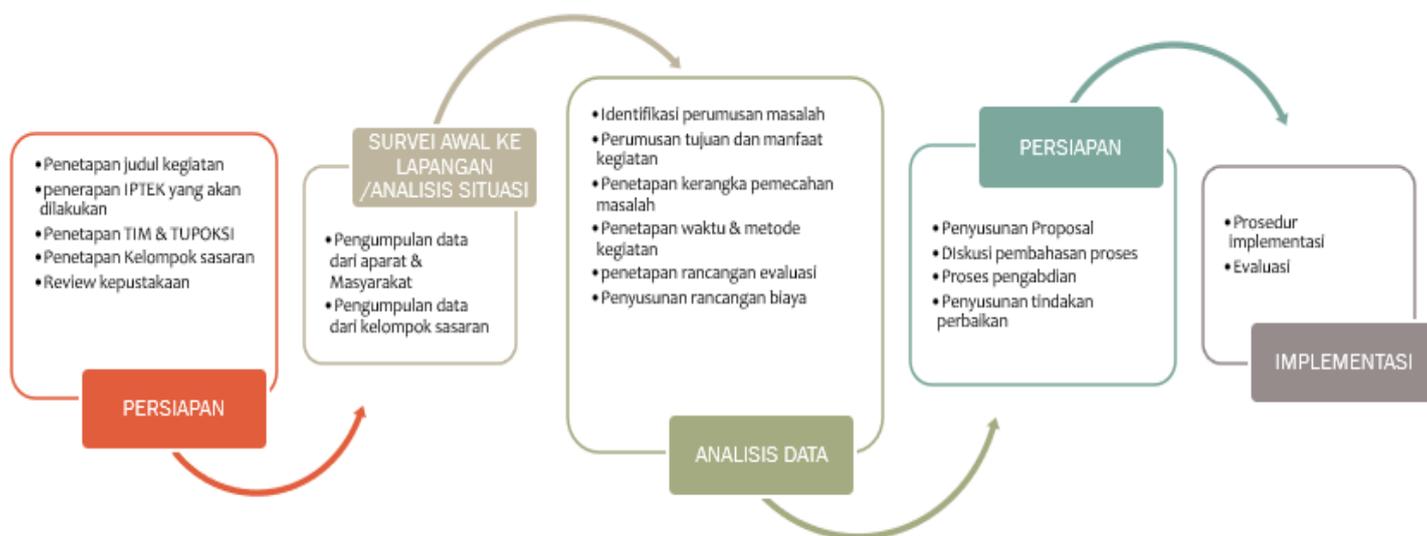
PT memberikan jasa pendidikan tinggi, di antaranya terdiri atas Jasa Kurikuler (JK), Jasa Penelitian (JP), Jasa Pengabdian pada Masyarakat (JPM), Jasa Administrasi (JA), dan

Jasa Ekstrakurikuler (JE). Jasa pengabdian pada masyarakat (JPM) meliputi kegiatan-kegiatan untuk melayani masyarakat umum, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dan keterampilan yang merupakan jasa kurikuler dan jasa penelitian. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kategori peningkatan relevansi dan kualitas PT, yang dapat diwujudkan dengan berbagai program, diantaranya: (a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha kecil, (b) penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi, (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri.

Seperti telah disinggung, mutu PT adalah kesesuaian antara sifat-sifat jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggannya. Aspek mendasar dalam manajemen mutu terpadu (TQM) adalah fungsi manajemen mutu yang meliputi: (a) perencanaan mutu, (b) pengendalian mutu dan (c) peningkatan mutu.

- a) Perencanaan mutu yaitu proses identifikasi kebutuhan pelanggan secara objektif dan setepat mungkin. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan dalam penyusunan langkah pelaksanaannya.
- b) Pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkah-langkah (prosedur) yang telah direncanakan secara terkendali, sehingga semua berlangsung sebagaimana mestinya. Dengan demikian mutu jasa yang direncanakan tercapai dan terjamin.
- c) Peningkatan mutu adalah evaluasi untuk menemukan informasi tentang perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan evaluasi tentang jasa yang dihasilkannya. Dengan evaluasi dapat dilakukan peningkatan (perbaikan) mutu.

Tekad untuk meningkatkan mutu PT harus dibuktikan dengan adanya usaha nyata memperbaiki mutu. Upaya perbaikan tidak hanya sekali dan selesai, melainkan sedikit demi sedikit secara terus-menerus. Setiap kali perlu ditetapkan standar mutu dari sesuatu yang ingin dicapai. Standar mutu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat oleh PT perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki PT. Pada buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah disebutkan bahwa standar mutu ditetapkan dengan meramu visi PT (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif).



Gambar. 5.2 Gambar Siklus Standar Mutu Proposal Pengabdian

C. Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan untuk menunjang pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan untuk peneliti dosen muda/pemula yang sementara belum mampu mengakses sumber dana dari tempat lain, 2) Sumber pembiayaan berupa dana hibah yang berasal dari Ristekdikti melalui berbagai skema penelitian, sumber ini biasanya diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki pengalaman untuk memperoleh hibah ristekdikti, 3) Sumber pembiayaan yang berasal dari para sponsor melalui model kerjasama antar lembaga, sumberdana ini umumnya diperoleh melalui kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang disepakati bersama.

Alokasi anggaran pengabdian pada masyarakat diperuntukkan secara proporsional sesuai dengan pengembangan bidang desentralisasi dan kompetitif nasional/kerjasama dan penugasan. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skema pengabdian pada masyarakat. Sesuai dengan skema pengabdian pada masyarakat yang disediakan, maka setiap topik pengabdian pada masyarakat pada bidang desentralisasi dan kompetitif nasional/kerjasama dapat didanai minimum Rp. 50 juta per judul. Sedangkan untuk skema pengabdian pada masyarakat yang dikembangkan dan sumber pendanaannya dari internal perguruan tinggi dapat didanai maksimum Rp. 15 juta per judul.

D. Pengelolaan Hasil Pengabdian pada Masyarakat

Pengelolaan hasil pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting dalam penjaminan mutu pengabdian pada masyarakat. Kontribusi besar dari pengelolaan hasil pengabdian pada masyarakat, terutama dari hasil pengabdian pada masyarakat yang memberikan pemasukan dana bagi perguruan tinggi melalui hukum bisnis dan bentuk-bentuk lain yang dikelola secara melembaga. Terbangunnya sistem yang baik dalam pengelolaan hasil penelitian di Uninus memungkinkan terjadinya Siklus Intelektual (*Intellectual Cycle*) yang baik dalam kelembagaan DRIPM Uninus. Beberapa bentuk pengabdian pada masyarakat yang dapat dikelola, diantaranya:

1. Laporan Akhir

Ketua pengabdian pada masyarakat wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil pengabdian pada masyarakat berupa hard copy dan draft artikel jurnal serta dalam bentuk soft copy. Ketua pengabdian pada masyarakat wajib menyampaikan luaran pengabdian pada masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll.)

2. Diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat

Hasil-hasil pengabdian pada masyarakat dosen Uninus harus disebarluaskan agar terjadi diseminasi dan fertilisasi silang antara berbagai temuan pengabdian pada masyarakat. Forum yang tepat untuk mendiseminasi hasil pengabdian pada masyarakat kepada akademisi dan sesama pengabdian adalah melalui jurnal ilmiah internasional, nasional terakreditasi maupun nasional tak terakreditasi ber-ISSN dan melalui pertemuan ilmiah. DRIPM Uninus juga menyediakan insentif bagi pengabdian yang telah berhasil mempublikasikan hasil pengabdianannya pada jurnal ilmiah internasional terindeks scopus, dan menerbitkan buku.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) 2020-2025 yang telah disusun merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian pada masyarakat jangka menengah yang mengacu kepada Statuta Universitas Islam Nusantara, Renstra Universitas Islam Nusantara, Rencana Induk Pembangunan, dan Keputusan Senat yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat.

RIPPM Uninus ini dijadikan sebagai panduan pelaksanaan semua program yang terkait pengabdian pada masyarakat unggulan di Uninus. Oleh karena itu, peran penting kesiapan organisasi dan sumber daya manusia terutama di dalam proses implementasi pengabdian pada masyarakat. RIPPM ini ditujukan bagi dosen di lingkungan Universitas Islam Nusantara yang akan menyusun usulan pengabdian pada masyarakat, sehingga hasil pengabdian pada masyarakat yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat.

Keberlanjutan setelah periode RIPPM 2020- 2025 dilaksanakan, diharapkan ada penyempurnaan sesuai dengan perkembangan jaman. Selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan RIPPM periode berikutnya, sehingga ada kontinuitas yang pada akhirnya diharapkan diperoleh out put dan out come pengabdian pada masyarakat khususnya di lingkungan Universitas Islam Nusantara yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sivitas akademika, stakeholders/masyarakat, lembaga dan pemerintah. Demikian RIPPM Uninus ini disusun semoga bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan institusi dalam rangka mewujudkan keunggulan Uninus.

DAFTAR PUSTAKA

- Directorate General of Higher Education, 2003, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 - 2010.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi VI, 2002, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku I Proses Pembelajaran, 2004, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Rencana Strategis dan Operasional Universitas Islam Nusantara Periode 2016 – 2020.
- Slamet, M. 2004, Filosofi Mutu Kinerja dan Pengertian Tentang Manajemen Mutu Terpadu. Statuta Universitas Islam Nusantara.
- Tampubolon, D.P., 2001, Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.